



LKj-IP | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Isu-isu Strategis.....	5
1.5 Cascading Kinerja	6
1.6 Peta Proses Bisnis	9
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Tujuan dan sasaran	13
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	16
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS	22
3.1 Analisis Capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 ..	24
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 – 2023	28
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode renstra.....	34
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional (target SPM)..	36
3.5 Akuntabilitas keuangan	37
3.6 Pencapaian kinerja dan anggaran	38
3.7 Efisiensi penggunaan sumber daya	40
3.8 Prestasi dan Penghargaan	41
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023;
3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023;
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023;
5. Pengukuran Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023;
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023;
7. Penghargaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023;
8. Dokumentasi Kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023;
9. Dokumentasi Prestasi dan Penghargaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.7.1	11
Tabel 1.7.2	11
Tabel 2.2.1	14
Tabel 2.3.1	16
Tabel 2.3.2	18
Tabel 2.4.1	19
Tabel 2.4.2	19
Tabel 2.4.3	20
Tabel 3.1	23
Tabel 3.2	24
Tabel 3.1.1	25
Tabel 3.2.1	29
Tabel 3.2.2	30
Tabel 3.2.3	30
Tabel 3.2.4	31
Tabel 3.2.5	32
Tabel 3.2.6	32
Tabel 3.2.7	33
Tabel 3.2.8	33
Tabel 3.2.9	34
Tabel 3.3.1	35
Tabel 3.4.1	36
Tabel 3.5.1	37

Tabel 3.6.1	38
Tabel 3.8.1	41
Tabel I	xiv
Tabel II	xiv
Tabel III	xv
Tabel IV	xvi
Tabel V	xviii
Tabel VI	xxi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1	4
Gambar 1.5.1	8
Gambar 1.6.1	10
Gambar 3.8.1	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai Januari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19711229 200012 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan ke 4 Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menjalankan fungsi : a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup fungsinya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup fungsinya; d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya; dan e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 1 dan 3 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu **“Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri”** dan **“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas”** dan SASARAN yang ke 2 pada misi 1 dan sasaran ke 3 pada misi 3 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai”** dan **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penanganan Bencana”**

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2021-2026 telah menetapkan 3 (tiga) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 9 (sembilan) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

- I. ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatanPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. KegiatanAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Pemberdayaan Sosial
1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- III. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- IV. Program Program Rehabilitasi Sosial
1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
 - Sub kegiatan Penyediaan Sandang
 - Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

- V. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Sub kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
 2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- VI. Program Penanganan Bencana
1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Penyediaan Makanan
 - Sub kegiatan Penyediaan Sandang
 - Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
- VII. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- VIII. Program Administrasi Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- IX. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat
 - Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
 - Sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. I
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Dumai pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase(%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.	Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	42%
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif	100%
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 7.464.445.202,- (*Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Rupiah*) untuk melaksanakan 9 (sembilan) Program Kerja antara lain :

Tabel. II
Program Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Dumai Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 4.999.462.762,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 309.164.140,-	APBD

3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 2.100.000,-	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 438.059.400,-	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 600.000.000,-	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 170.000.000,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 12.458.900,-	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 93.568.000,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 839.632.000,-	APBD
J U M L A H		Rp 7.464.445.202,-	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. III
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp 6.005.088.000,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 551.164.140,-	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 2.100.000,-	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.523.998.700,-	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.932.982.000,-	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 238.280.000,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 17.458.900,-	APBD

8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 93.568.000,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.539.632.000,-	APBD
J U M L A H		Rp 13.904.271.740,-	

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. IV

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	100%	100%	√	-	-	-
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	42%	75%	179%	√	-	-	-

		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif	100%	100%	100%	√	-	-	-
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100%	100%	100%	√	-	-	-

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 85% s.d 100% yaitu Sangat Berhasil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.904.271.740,- (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) bersumber dari APBD. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 13.849.393.240,- (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp 54.878.500,- (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

1 Belanja Operasi : Rp. 13.849.393.240,-

.

2 Belanja Modal : Rp. 54.878.500,-

.

Jumlah : **Rp. 13.904.271.740,-**

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel. V
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial							
Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	100%	100%			
Program : - Program rehabilitasi sosial.	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator spm)	100%	100%	100%	3.523.998.700	3.470.356.630	98,48

- Program pemberdayaan sosial.	- Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kab/kota yang diberdayakan - Persentase (%) pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	551.164.140	546.434.280	99,14
- Program perlindungan dan jaminan sosial.	- Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kab/kota ke desa/kelurahan asal	100%	100%	100%	1.932.982.000	1.836.886.900	95.03
- Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	- Persentase (%) pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kab/kota	100%	100%	100%	2.100.000	2.100.000	100
- Program pengelolaan taman makam pahlawan.		100%	100%	100%	17.458.900	15.410.600	88.27
Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan							

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	- Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) - Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif	42% 100%	75% 100%	179% 100%			
Program : - Program administrasi pemerintahan desa. - Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat.	- Persentase kinerja dan manajemen aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan - Persentase lpm yang lebih produktif dan mandiri dalam perencanaan pembangunan	42% 100%	75% 100%	179% 100%	93.568.000 1.539.632.000	92.944.034 1.529.080.716	99,33 99,58
Tujuan: Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana							
Sasaran : Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	100%	100%	100%			
Program : - Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	100%	100%	100%	238.280.000	236.647.478	99,31

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi

dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. VI
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KET
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	98,48	53.642.070,-	1,5%	Efisien
2	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	179%	99,33%	623.966,-	0,67%	Efisien
		Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif	100%	99,58%	10.551.284,-	0,69%	Efisien
3	Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	100%	99,58	1.632.522,-	0,69%	Efisien

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, tingkat efisiensinya adalah 1,52 % (Rp. 53.642.070,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun

2023 (98,48%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **efisien**;

2. Pada Indikator Kinerja Utama ke dua yaitu Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang), tingkat efisiensinya adalah 0,67% (Rp. 623.966,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (179%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,33%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **efisien**;
3. Pada Indikator Kinerja Utama ke tiga yaitu Persentase LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif, tingkat efisiensinya adalah 0,69% (Rp. 10.551.284,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,58%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **efisien**;
4. Pada Indikator Kinerja Utama ke empat yaitu Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm), tingkat efisiensinya adalah 0,69% (Rp. 1.632.522,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,58%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **efisien**.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKJIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKJIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke 4 atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (tanggung jawab) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial,

- Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

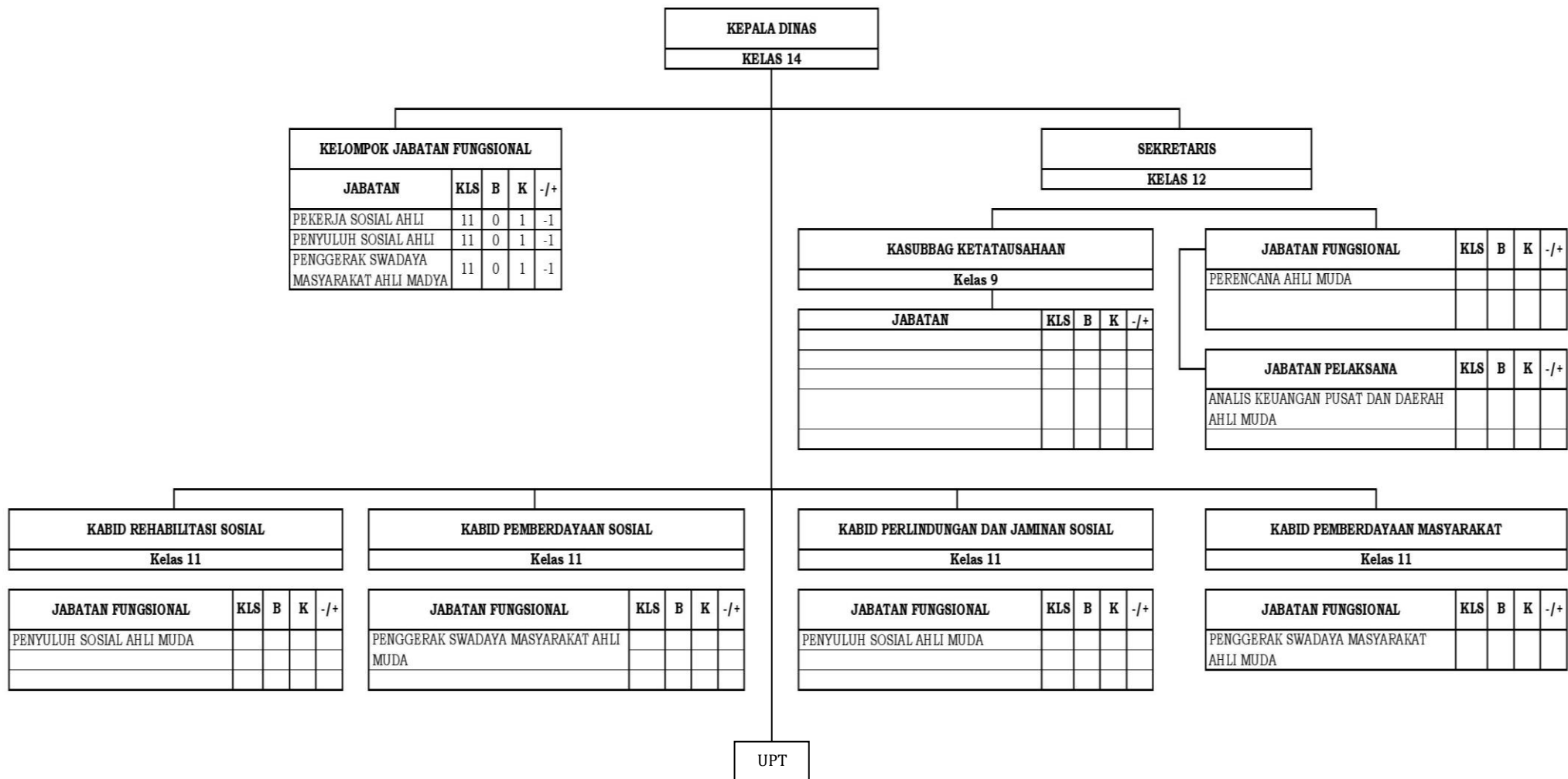
Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terdiri dari :

1. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Sekretariat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Subbagian Ketatausahaan, Keuangan dan Aset
 - b. Jabatan Fungsional Perenca Ahli Muda
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
7. Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT), membawahi :
 - a. Kepala Subbagian Tata Usaha

NOMOR 34TAHUN 2022 TANGGAL 27 MEI 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

Gambar 1.2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan bidang sosial yang perlu ditangani sbb:

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Dumai;
2. Kebutuhan layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat;
3. Sarana dan Prasarana serta SDM dalam pelayanan kepada PPKS masih minim.
4. Perlunya bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Sosial dan korban bencana;
5. Belum optimalnya sistem pendataan bagi penduduk miskin dan rentan miskin;

6. Perlunya pengembangan sumber daya Pegawai dan kerjasama serta Koordinasi pelaksanaan Kegiatan.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Dumai mengacu pada Visi Walikota Dumai yaitu : **“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU”** dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Dumai perlu adanya pejabaran untuk mendukung visi tersebut untuk itu ditetapkan dua Misi Pemerintah Kota Dumai yang berkaitan dengan bidang sosial yakni:

Misi Satu yaitu : “Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri” dan

Misi Tiga yaitu : “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas”

sebagai pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Program/kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai juga mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan

4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

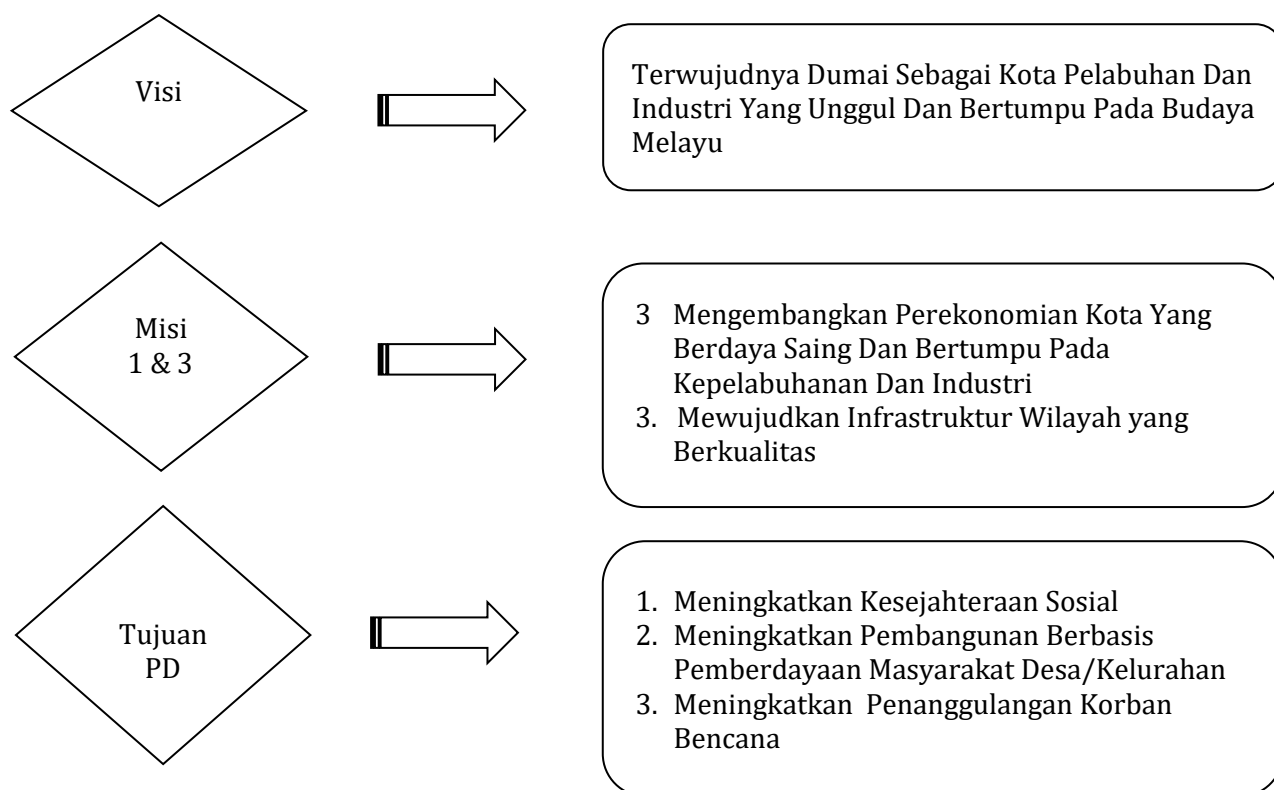
Selanjutnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai juga mempunyai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:

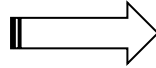
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

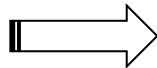
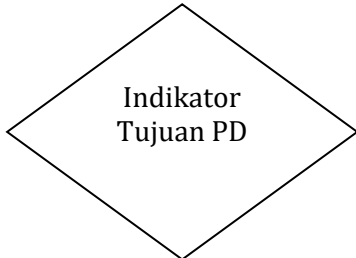
Gambar 1.5.1

Cascading Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

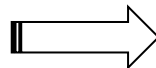
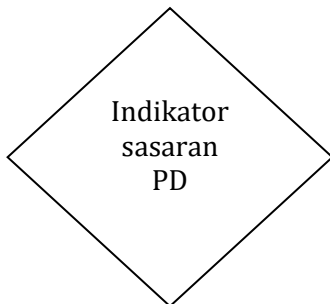




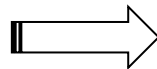
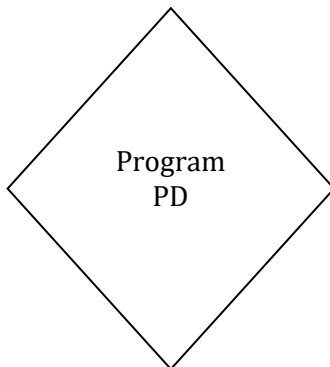
1. Meningkatnya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
3. Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana



1. Persentase PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
2. Nilai Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (EPDESKEK)/IDM
3. Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana



1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
2. Persentase pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (kurang berkembang)
3. Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi/aktif)
4. Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota

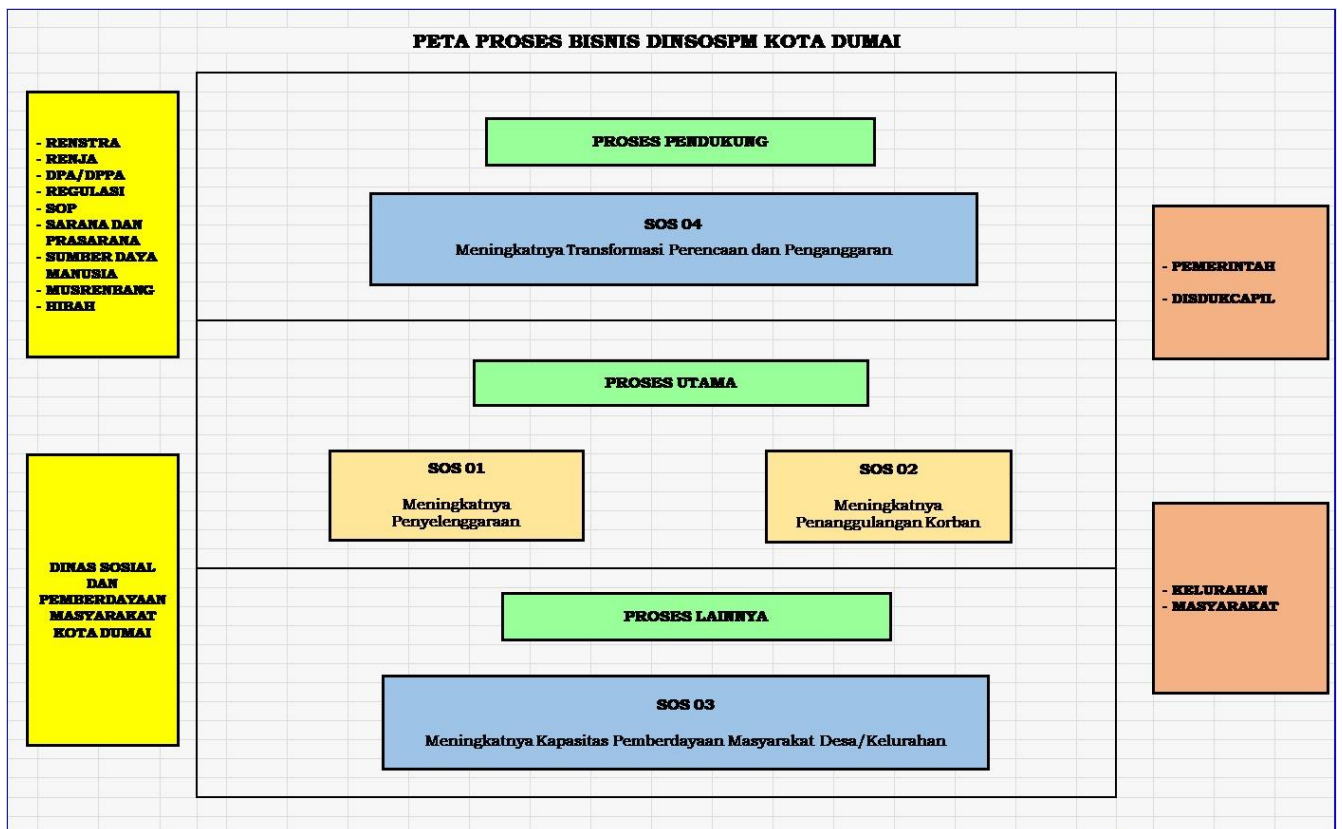


1. Program rehabilitasi sosial
2. Program administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan
3. Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Penanganan Bencana

1.6 **Peta Proses Bisnis**

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.6.1



1.7 **Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1302.1/INSP-S Tanggal 8 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.7.1

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Tidak membuat Perjanjian Kinerja dilevel staf/pelaksana.	Kepada Seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang, mulai dari Kepala Dinas sampai level pelaksana.
2.	Tidak membuat Rencana Aksi dilevel staf/pelaksana.	Kepada Seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar membuat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang merupakan gambaran perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja secara berjenjang, mulai dari kepala Dinas sampai level pelaksana.
3.	Belum optimal dalam penyajian narasi atau definisi yang jelas atas kinerja dan cara mengukurnya.	Dalam Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, agar kedepannya menyajikan narasi dan/atau definisi yang jelas atas kinerja dan cara mengukur capaian kinerja.
4.	Penyampaian dalam menyusun Laporan Kinerja belum jelas terkait efisiensi atas sumber daya yang digunakan untuk mencapai kinerja.	Dalam menyusun Laporan Kinerja, agar kedepannya menyampaikan secara jelas terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
5.	Analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan yang kurang terperinci penjelasannya dalam menyusun laporan kinerja.	Dalam menyusun Laporan Kinerja, agar kedepannya menyampaikan secara rinci terkait analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan atas kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.7.2

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Membuat Perjanjian Kinerja seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat secara berjenjang, mulai dari Kepala Dinas sampai level pelaksana.	7 Hari

2.	Membuat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja seluruh ASN pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat secara berjenjang, mulai dari Kepala Dinas sampai level pelaksana.	7 Hari
3.	Menyajikan narasi dan/atau definisi yang jelas atas kinerja dan cara mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).	7 Hari
4.	Menyampaikan secara jelas terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja dalam menyusun laporan kinerja.	7 Hari
5.	Menyampaikan secara rinci terkait analisa penyebab keberhasilan atau kegagalan pada laporan kinerja.	7 Hari

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

- ✓ ***Misi 1 “ Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri “***
- ✓ ***Misi 3 “ Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas “***

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota

Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu						
Misi ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri						
Misi ke 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas						
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase ppks yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (INDIKATOR SPM)	100%
2.	Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel)	> 201-350	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (Kurang Berkembang)	42%
					Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/Aktif	100%
3.	Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (INDIKATOR SPM)	100%

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Dumai Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dan Bertumpu pada Kepelabuhanan dan Industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Peningkatkan Perlindungan Sosial	1. Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin 2. Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial

Misi ke 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana	1. Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana 2. Mengoptimalkan upaya penanganan pasca kejadian bencana	1. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral 2. Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
8. Program Administrasi Pemerintahan Desa
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (INDIKATOR SPM)
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	1. Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (Kurang Berkembang) 2. Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/ Aktif
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (INDIKATOR SPM)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun
2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti (INDIKATOR SPM)	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal	42%
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/Aktif	100%
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (INDIKATOR SPM)	100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 7.464.445.202,- (*Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Rupiah*) untuk melaksanakan 9 (Sembilan) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.4.2
Program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 4.999.462.762,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 309.164.140,-	APBD

3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 2.100.000,-	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 438.059.400,-	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 600.000.000,-	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 170.000.000,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 12.458.900,-	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 93.568.000,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Rp. 839.632.000,-	APBD
J U M L A H		Rp. 7.464.445.202,-	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.904.271.740,- (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.3
Program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Perubahan Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 6.005.088.000,-	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 551.164.140,-	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 2.100.000,-	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.523.998.700,-	APBD

5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.932.982.000,-	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 238.280.000,-	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 17.458.900,-	APBD
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 93.568.000,-	APBD
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	Rp. 1.539.632.000,-	APBD
J U M L A H		Rp. 13.904.271.740,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

1. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

- b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 3.1.1 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1**Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023**

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).	73%	155%	42%	75%	179%	Sangat Berhasil
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif.	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
 - a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100 % realisasi sebesar 100 %, tercapai 100 % atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi).
Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100 % atau tercapai sebesar 100 %, maka capaian tahun 2023 tetap (sama dengan pencapaian tahun 2022).
 - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- Adanya koordinasi antar Instansi terkait;
 - Akses pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mudah dijangkau.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti adalah sebagai berikut:
- Terbatasnya SDM Pendamping Pelayanan PPKS;
 - Minimnya sarana dan prasarana pendukung Pelayanan PPKS.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Pendamping;
 - Membuat usulan program dan kegiatan yang mendukung termasuk kebutuhan sarana dan prasarana.
2. Indikator Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).
- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang), menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 42%, realisasi sebesar 75%, tercapai 179% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 73% atau tercapai sebesar 155%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 24%.
- b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- SDM yang tersedia;
 - Sarana dan Prasarana yang ada.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) adalah sebagai berikut:
- Kinerja SDM yang kurang optimal;
 - Lokasi kelurahan yang jauh, akses yang sulit dan jaringan internet yang tidak bagus.

- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) adalah sebagai berikut:
 - Pembinaan yang dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi (Monev);
 - Pemberian Reward (Penghargaan) dan Punishment.
3. Indikator Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif
- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 tetap (sama dengan pencapaian tahun 2022).
 - b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - SDM yang tersedia;
 - Sarana dan Prasarana yang ada.
 - c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif adalah sebagai berikut:
 - Kinerja SDM yang kurang optimal;
 - Fungsi kepengurusan organisasi kelembagaan belum berjalan optimal.
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif adalah sebagai berikut:
 - Pembinaan yang dilakukan dengan cara Monitoring dan Evaluasi (Monev);
 - Pemberian Reward (Penghargaan) dan Punishment.
4. Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.
- a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100%, realisasi

sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja ≥ 90 (sangat tinggi).

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 tetap (sama dengan pencapaian tahun 2022).

- b. Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
 - Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial;
 - Adanya jejaring /kemitraan antar OPD dan organisasi masyarakat dalam bentuk penanganan atas kebutuhan bagi korban bencana alam dan sosial.
- c. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota adalah sebagai berikut :
 - Perubahan kondisi lingkungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak pada meningkatnya ancaman risiko bencana;
 - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang lengkap dan berkualitas.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota adalah sebagai berikut:
 - Kolaborasi bersama OPD Teknis terkait dalam meminimalisir terjadinya bencana pada titik-titik wilayah yang rawan akan terjadinya bencana;
 - Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan sosial.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.	Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).	47%	42%	73%	75%	155%	179%
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat 4 Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai selama 5 tahun kedepan.

Indikator pertama adalah Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target pada tahun 2022 adalah 100% (Indikator SPM), berasal dari perhitungan jumlah penyandang

disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti dibagi dengan populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100%. Perhitungan ini berpedoman pada Permendagri nomor 59 tahun 2021 dan Permensos nomor 9 tahun 2018 yaitu terkait Penerapan Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal.

- b. Pada tahun 2022 populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis berjumlah 1.860 jiwa yaitu yang terdiri dari : penyandang disabilitas terlantar sebanyak 595 jiwa, anak terlantar 7 jiwa, lanjut usia terlantar 1.210 jiwa, dan Gelandangan Pengemis (OT) sebanyak 48 jiwa. Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100%, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2.2

Realisasi kinerja indikator pertama Tahun 2022

No	INDIKATOR	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis}} \times 100\%$	$\frac{1.860}{1.860} \times 100\%$	100%

- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap yaitu 100% dan realisasinya adalah 100% dan capaian kinerja 100% dengan rinciannya yaitu populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis berjumlah 2.283 jiwa, yang terdiri dari : penyandang disabilitas terlantar sebanyak 460 jiwa, anak terlantar 16 jiwa, lanjut usia terlantar 1.714 jiwa, dan Gelandangan Pengemis (OT) sebanyak 93 jiwa. dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2.3

Realisasi kinerja indikator pertama Tahun 2023

No	INDIKATOR	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase	Jumlah penyandang disabilitas		

penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	x 100%	$\frac{2.283}{2.283} \times 100\%$	100%
	Populasi penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis			

2. a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase pengentasan desa / kelurahan tertinggal (kurang berkembang) dengan target 2022 adalah 47%, berasal dari perhitungan jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria desa/kelurahan berkembang per tahun berdasarkan indeks desa /kelurahan membangun per tahun dibagi dengan jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun *n* dikali 100%. Perhitungan ini berpedoman pada Permendagri nomor 18 tahun 2020 hal. 143 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Pada tahun 2022 jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun *n* yaitu 26 kelurahan dan jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria desa/kelurahan berkembang per tahun berdasarkan indeks desa /kelurahan membangun per tahun sebanyak 19 kelurahan. Realisasi pada tahun 2022 adalah 73% dengan capaian 155%, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2.4

Realisasi kinerja indikator kedua Tahun 2022

No	INDIKATOR	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria desa/kelurahan berkembang per tahun berdasarkan indeks desa /kelurahan membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun } n} \times 100\%$	$\frac{19}{26} \times 100\%$	73%

c. Pada tahun 2023 target kinerja berubah yaitu 42% dan realisasinya adalah 75% dan capaian kinerja 179% dengan rinciannya yaitu jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun *n* yaitu 8 kelurahan dan jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria

desa/kelurahan berkembang per tahun berdasarkan indeks desa /kelurahan membangun per tahun sebanyak 6 kelurahan, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2.5

Realisasi kinerja indikator kedua Tahun 2023

No	INDIKATOR	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang).	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria desa/kelurahan berkembang per tahun berdasarkan indeks desa /kelurahan membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun n}} \times 100\%$	$\frac{6}{8} \times 100\%$	75%

3. a. Indikator Kinerja Utama yang ke tiga adalah Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif, dengan target 2022 adalah 100%, berasal dari perhitungan jumlah LPM berprestasi dibagi dengan jumlah LPM dikali 100%. Perhitungan ini berpedoman pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 hal.222 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

b. Pada tahun 2022 jumlah LPM 36 dan jumlah LPM yang berprestasi/aktif 36 LPM..Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100%, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2.6

Realisasi kinerja indikator ketiga Tahun 2022

No	INDIKATOR	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase LPM berprestasi/aktif.	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi (aktif)}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	$\frac{36}{36} \times 100\%$	100%

c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap yaitu 100% dan realisasinya adalah 100% dan capaian kinerja 100% dengan rinciannya yaitu jumlah LPM 36 dan jumlah LPM yang berprestasi/aktif sebanyak 36 LPM, dapat dilihat dari tabel

berikut :

Tabel 3.2.7

Realisasi kinerja indikator kedua Tahun 2023

No	INDIKATOR	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase LPM berprestasi/aktif.	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi (aktif)}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	$\frac{36}{36} \times 100\%$	100%

4. a. Indikator Kinerja Utama yang ke empat adalah Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota, berasal dari perhitungan Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi dengan Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota dikali 100%. Perhitungan ini berpedoman pada Permendagri nomor 59 tahun 2021 dan Permensos nomor 9 tahun 2018 yaitu terkait Penerapan Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal.

b. Pada tahun 2022 populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota berjumlah 267 jiwa yaitu yang terdiri dari : korban bencana alam sebanyak 123 jiwa dan korban bencana sosial 144 jiwa. Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100%, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2.8

Realisasi kinerja indikator pertama Tahun 2022

No	INDIKATOR	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggapan darurat bencana daerah kab/kota (indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/ kota yang membutuhkan perlindungan dan}} \times 100\%$	$\frac{267}{267} \times 100\%$	100%

		jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/ kota		
--	--	---	--	--

c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap yaitu 100% dan realisasinya adalah 100% dan capaian kinerja 100% dengan rinciannya yaitu populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota berjumlah 468 jiwa yaitu yang terdiri dari : korban bencana alam sebanyak 246 jiwa dan korban bencana sosial 222 jiwa. dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2.9

Realisasi kinerja indikator pertama Tahun 2023

No	INDIKATOR	Rumus	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggapan darurat bencana daerah kab/kota (indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{459}{459} \times 100\%$	100%

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan BERHASIL.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
1	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%
2	MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (KURANG BERKEMBANG)	25%	75%	300%
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/Aktif	100%	100%	100%
3	MENINGKATNYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	100%	100%	100%

Upaya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas SDM pendamping layanan PPKS;
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait dalam upaya pelayanan PPKS ;
- Membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung layanan PPKS.

2. Capaian Indikator Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang), sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas SDM kelurahan ;
- Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan ;
- Pemberian apresiasi (reward) dan punishment terhadap kinerja kelurahan yang baik;
- Peningkatan akses / jaringan internet dan sarana dan prasana penunjang kegiatan.

3. Capaian Indikator Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) berprestasi/aktif, sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas SDM LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan);
- Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan ;
- Pemberian apresiasi (reward) dan punishment terhadap kinerja LKK;

4. Capaian Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota, sebagai berikut :

- Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan sosial;
- Melakukan Kolaborasi bersama OPD Teknis terkait dalam meminimalisir terjadinya bencana pada titik-titik wilayah yang rawan akan terjadinya bencana.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel 3.4.1 berikut :

Tabel 3.4.1
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	-	Tidak ada
2	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	100%	-	Tidak ada

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Dumai pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 13.904.271.740,- (*Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 13.849.393.240,- (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp 54.878.500,- (*Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 13.628.836.667,- (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp 13.574.117.667 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp 54.719.000,- (*Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.1
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	- Program pemberdayaan sosial.	551.164.140	546.434.280	99,14
		- Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.	2.100.000	2.100.000	100
		- Program rehabilitasi sosial.	3.523.998.700	3.470.356.630	98,48
		- Program perlindungan dan jaminan sosial.	1.932.982.000	1.836.886.900	95.03
		- Program pengelolaan taman makam pahlawan.	17.458.900	15.410.600	88.27

2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.	- Program administrasi pemerintahan desa.	93.568.000	92.944.034	99,33
		- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat.	1.539.632.000	1.529.080.716	99,58
3	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	- Program penanganan bencana	238.280.000	236.647.478	99,31

Total anggaran belanja adalah Rp 13.904.271.740,- (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan realisasi Rp 13.628.836.667,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau dengan capaian sebesar 98,02% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Penyusunan pagu anggaran terhadap barang dan jasa yang tidak sesuai dengan harga pasar;
2. Adanya silpa terhadap anggaran salah satunya pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
3. Kurang optimalnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran.

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial							
Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	100%	100%			

Program :								
- Program rehabilitasi sosial.	- Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator spm)	100%	100%	100%	3.523.998.700	3.470.356.630	98,48	
- Program pemberdayaan sosial.	- Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kab/kota yang diberdayakan	100%	100%	100%	551.164.140	546.434.280	99,14	
- Program perlindungan dan jaminan sosial.	- Persentase (%) pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	1.932.982.000	1.836.886.900	95.03	
- Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	- Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah kab/kota ke desa/kelurahan asal	100%	100%	100%	2.100.000	2.100.000	100	
- Program pengelolaan taman makam pahlawan.	- Persentase (%) pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kab/kota	100%	100%	100%	17.458.900	15.410.600	88.27	

Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Sasaran :								
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	- Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	42%	75%	179%				
	- Persentase lpm (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif	100%	100%	100%				

Program : - Program administrasi pemerintahan desa.	- Persentase kinerja dan manajemen aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan	42%	75%	179%	93.568.000	92.944.034	99,33
- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat hukum adat.	- Persentase lpm yang lebih produktif dan mandiri dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	1.539.632.000	1.529.080.716	99,58
Tujuan: Meningkatkan Penanggulangan Korban Bencana							
Sasaran : Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	100%	100%	100%			
Program : - Program Penanganan Bencana	- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm)	100%	100%	100%	238.280.000	236.647.478	99,31

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, tingkat efisiensinya adalah 1,52 % (Rp. 53.642.070,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,48%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *efisien*;

- b. Pada Indikator Kinerja Utama ke dua yaitu Persentase pengentasan desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang), tingkat efisiensinya adalah 0,67% (Rp. 623.966,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (179%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,33%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *efisien*;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama ke tiga yaitu Persentase LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) berprestasi/aktif, tingkat efisiensinya adalah 0,69% (Rp. 10.551.284,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,58%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *efisien*;
- d. Pada Indikator Kinerja Utama ke empat yaitu Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (indikator spm), tingkat efisiensinya adalah 0,69% (Rp. 1.632.522,-) berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dikurangi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,58%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori *efisien*.

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8.1

Prestasi dan Penghargaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan	Juara 1	Provinsi	Gubernur Riau
2	Piagam Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan	Juara 3	Regional	Menteri Dalam Negeri
2	Piagam Penghargaan Lomba LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	Juara 2	Provinsi	Gubernur Riau
4	Sertifikat Karang Taruna Berprestasi	Juara 2	Provinsi	Kepala Dinas Sosial Prov. Riau

**GAMBAR 3.8.1
PENGHARGAAN**



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun anggaran 2023. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada publik terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai serta upaya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel.

Meskipun secara umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik, namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak ada permasalahan, hambatan maupun kekurangan baik yang bersifat khusus dan teknis. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana teknis;
2. Sarana dan Prasarana serta SDM dalam pelayanan kepada PPKS masih minim;
3. Belum tercukupinya anggaran dari APBD Kota Dumai Tahun 2023;
4. Perlunya pengembangan sumber daya Pegawai dan kerjasama serta Koordinasi pelaksanaan Kegiatan;
5. Belum optimalnya realisasi anggaran disalah satu Sub kegiatan pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan .

Dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai masih diperlukan perbaikan dari berbagai bidang untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Dalam mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain dalam bentuk:

1. Perlu adanya dukungan dana yang memadai agar program dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah.

2. Evaluasi kegiatan dalam hal pencapaian keluaran, hasil dan manfaat serta pencapaian terhadap kelompok sasaran.
3. Diperlukan adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan data sehingga setiap hasil/outcome dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat terlihat dan tergambar dalam setiap laporan hasil kegiatan/program yang akhirnya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.
4. Monitoring secara terus menerus untuk melihat progres dari capaian kegiatan yang dilaksanakan.
5. Untuk meningkatkan prestasi kerja diperlukan penambahan fasilitas kerja antara lain fasilitas komputer disetiap Bidang dan Bagian, serta penambahan jumlah pegawai yang saat ini masih dirasakan kurang.

Dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah tersebut diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul di tahun-tahun mendatang sehingga capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai akan meningkat.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2024
KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
Nip. 19711229 200012 2 001

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Visi	: Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
Misi I	: “Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri”
Misi III	: “Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas”
Sasaran	: Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
	Meningkatnya penanggulangan korban bencana

No	TUJUAN										SASARAN										Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran			Ket	
	Uraian	Indikator	Kondisi Awal		Target						Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal		Target						Strategi	Kebijakan		Program
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya penyelenggara kesejahteraan sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator s-pm)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis}} \times 100\%$	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan Perlindungan Sosial	1. Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin 2. Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial	Program rehabilitasi sosial	
2	Meningkatkan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan	Nilai evaluasi perkembangan Desa & Kelurahan (Epdskel)	N/A	N/A	> 201-350	> 201-350	> 201-350	>351	>351	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase pengentasan Desa/Kelurahan tertinggal (kurang berkembang)	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria disakurakan berkembang per tahun berdasarkan indeks desa/kelurahan dibanding per tahun}}{\text{Jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun}} \times 100\%$	N/A	N/A	47	42	36	30	25			Program administrasi pemerintah Desa/ Kelurahan			
										Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi/aktif)	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi (aktif)}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	N/A	N/A	100	100	100	100	100			Program pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga adat dan masyarakat hukum adat				
3	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100	100	1. Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana 2. Mengoptimalkan upaya penanganan pasca kejadian bencana	1. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral 2. Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana	Program Penanggulangan Bencana		

Kepala,

drg. HERMIYATI

NIP. 19711229 200012 2 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100%
2	MENINGKATNYA KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (KURANG BERKEMBANG)	%	42%
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/Aktif	%	100%
3	MENINGKATNYA PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	%	100%

Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota
Dumai,

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
Nip. 19711229 200012 2 001

**PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI TAHUN 2023**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drg. HERMIYATI**
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA DUMAI**

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**
Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS


drg. HERMIYATI
NIP.19711229 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti (Indikator SPM)	%	100
2	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (Indikator SPM)	%	100
3	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (Kurang Berkembang)	%	42
		Persentase LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) Berprestasi/Aktif	%	100

1 Sasaran 1

Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**309.164.140**

1.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

309.164.140

2.PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**2.100.000**

2.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

2.100.000

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**438.059.400**

3.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

438.059.400

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**600.000.000**

4.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

600.000.000

Meningkatnya
Penanggulangan
Korban Bencana

**5. PROGRAM PENANGANAN
BENCANA 170.000.000**

5.1 Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan
Sosial Kabupaten/Kota 100.000.000

5.2 Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota 70.000.000

**6. PROGRAM PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN 12.458.900**

6.1 Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional 12.458.900
Kabupaten/Kota

Meningkatnya
Kapasitas
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa/Kelurahan

**7. PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA 93.568.000**

7.1 Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa 93.568.000

**8. PROGRAM PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT 839.632.000**

8.1 Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta
Pemberdayaan Masyarakat
839.632.000
Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

JUMLAH 2.464.982.440



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KOTA DUMAI TAHUN 2023**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. HERMIYATI

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, 2023

Pihak Pertama



drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP.19711229 200012 2 001

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Dan Celandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti (Indikator SPM)	%	100
2	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota (Indikator SPM)	%	100
3	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (Kurang Berkembang)	%	42
		Persentase LPM (LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) Berprestasi/Aktif	%	100

Sasaran :	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.005.088.000
		2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	551.164.140
		3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA	2.100.000
		4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.523.998.700
		5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.932.982.000
		6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	17.458.900
	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	7. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	238.280.000
	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	8. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	93.568.000
		9. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.539.632.000
	JUMLAH	13.904.271.740	

Dumai, 25 September 2023



**PENGUKURAN KINERJA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Hitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis}} \times 100\%$	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Pengentasan Desa/Kelurahan Tertinggal (KURANG BERKEMBANG)	%	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan tertinggal yang memenuhi kriteria desa/kelurahan berkembang per tahun berdasarkan indeks desa /kelurahan membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa/kelurahan tertinggal (kurang berkembang) per awal tahun n}} \times 100\%$	42%	75%	179%
		Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi/Aktif	%	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi (aktif)}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Penanggulangan Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial didaerah kab/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/ kota}} \times 100\%$	100%	100%	100%

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Dumai,

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
Nip. 19711229 200012 2 001

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.005.088.000									5.898.976.029		98,23%		5.620.011.014		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.900.000		-		8.700.000		5.775.000		3.993.000		18.468.000		97,71%		18.468.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.100.000			1.455.000		1	645.000			2	2.100.000	100,00%	100,00%	2,00	2.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.100.000			1.995.000		1				1	1.995.000	100,00%	95,00%	1,00	1.995.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.100.000					1	1.995.000			1	1.995.000	100,00%	95,00%	1,00	1.995.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.100.000			2.085.000		1				1	2.085.000	100,00%	99,29%	1,00	2.085.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.100.000							1	1.995.000	1	1.995.000	100,00%	95,00%	1,00	1.995.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	6.300.000			1	3.165.000	1	3.135.000			2	6.300.000	100,00%	100,00%	2,00	6.300.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	2.100.000							3	1.998.000	3	1.998.000	100,00%	95,14%	3,00	1.998.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.988.662.340		696.257.264		1.303.247.883		875.077.820		1.056.813.415		3.931.396.382		98,56%		3.931.396.382
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang	3.985.512.340	7	695.207.264	7	1.303.247.883	6	874.027.820	8	1.055.763.415	28	3.928.246.382	100,00%	98,56%	28,00	3.928.246.382
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	1.050.000	2	1.050.000	-						2	1.050.000	100,00%	100,00%	2,00	1.050.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	2.100.000					1,0	1.050.000	1,0	1.050.000	2	2.100.000	100,00%	100,00%	2,00	2.100.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24.300.000		6.075.000		4.050.000		2.025.000				24.300.000		100,00%		24.300.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	24.300.000	0,25	6.075.000	0,25	4.050.000	0,25	2.025.000	0,25	12.150.000	1,00	24.300.000	100,00%	100,00%	1,00	24.300.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-		-		-		-		-		0,00%		-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	0	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-

Administrasi Umum Perangkat Daerah				397.852.708	74.001.991	82.469.999	61.618.964	151.699.490	369.790.444	92,95%	369.790.444							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.750.000		1,00	2.195.000		1,00	2.195.000	100,00%	79,82%	1,00	2.195.000				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	51.800.465			4,00	41.033.500		4	41.033.500	100,00%	79,21%	4,00	41.033.500			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	14.908.050		2	4.905.000		2	9.974.000	4	14.879.000	100,00%	99,81%	4,00	14.879.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	36.217.500	3	5.866.000	3	4.906.000	1	3.483.000	3	13.048.000	10,00	27.303.000	83,33%	75,39%	10,00	27.303.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	19.008.308		2	11.561.499	0,50	300.000	0,25	600.000	2,75	12.461.499	68,75%	65,56%	2,75	12.461.499	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	8.408.385	0,25	1.800.000	0,25	1.800.000	0,25	1.800.000	0,25	1.800.000	1,00	7.200.000	100,00%	85,63%	1,00	7.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	264.760.000	0,25	66.335.991	0,25	57.102.500	0,25	15.002.464	0,25	126.277.490	1,00	264.718.445	100,00%	99,98%	1,00	264.718.445
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				179.228.700		136.010.000		-		-		43.019.000		179.029.000		99,89%		179.029.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	125.208.000	1	125.160.000					1	125.160.000	100,00%	99,96%	1,00	125.160.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	unit	11.000.000	100	10.850.000					100	10.850.000	100,00%	98,64%	100,00	10.850.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	unit	43.020.700						13	43.019.000	13	43.019.000	100,00%	100,00%	13,00	43.019.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.101.348.360		266.045.135		259.517.665		192.254.247		372.876.753		1.090.693.800		99,03%		1.090.693.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.400.000	0,5	600.000				0,50	1.800.000	1,0	2.400.000	100,00%	100,00%	1,00	2.400.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	129.345.000	0,5	25.240.903	0,5	25.946.317	0,50	37.552.899	0,50	40.079.069	2,00	128.819.188	100,00%	99,59%	2,00	128.819.188
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	-										0,00%	0,00%	0,00	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	969.603.360	0,25	240.204.232	0,25	233.571.348	0,25	154.701.348	0,25	330.997.684	1,00	959.474.612	100,00%	98,96%	1,00	959.474.612
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				294.795.892		38.938.019		41.894.549		21.533.820		82.996.000		285.298.403		96,78%		185.362.388
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	24.695.892	0,25	6.000.000	0,25	6.000.000	0,25	6.000.000	0,25	6.600.000	1,00	24.600.000	100,00%	99,61%	1,00	24.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	137.500.000	4,00	25.478.019	3,00	34.824.549	4	12.528.820	3	60.502.000	14	133.333.388	100,00%	96,97%	14,00	133.333.388
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	unit	32.600.000	11	7.460.000	5	1.070.000	5	3.005.000	24	15.894.000	45,00	27.429.000	100,00%	84,14%	45,00	27.429.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	unit	100.000.000							1	99.936.015	1	99.936.015	100,00%	99,94%	1,00	99.936.015
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				551.164.140										546.434.280		99,14%		481.766.000

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				551.164.140		8.283.880		156.308.850		129.124.800		252.716.750		546.434.280		99,14%		481.766.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74	Orang	442.598.720			18	108.388.800	20	109.944.000	36	221.055.200	74,00	439.388.000	100,00%	99,27%	74,00	439.388.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Orang	42.544.320			2	10.537.800	1,5	10.689.000	4	21.151.200	7,00	42.378.000	100,00%	99,61%	7,00	42.378.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8.397	Keluarga	66.021.100	1.055,00	8.283.880	3.000	37.382.250	3.200	8.491.800	1.142	10.510.350	8.397	64.668.280	100,00%	97,95%	8397,00	64.668.280
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				2.100.000										2.100.000		100,00%		2.100.000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				2.100.000								2.100.000		2.100.000		100,00%		2.100.000
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	2.100.000							10	2.100.000	10	2.100.000	100,00%	100,00%	10,00	2.100.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3.523.998.700										3.470.356.630		98,48%		3.420.401.630

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				3.523.998.700		155.535.180		797.090.480		67.862.400		2.449.868.570		3.470.356.630		98,48%		3.420.401.630
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	311.248.240	5	8.700.000	5	10.575.000	5	5.875.000	85	284.532.000	100	309.682.000	100,00%	99,50%	100,00	309.682.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	34.361.000	15	4.850.000	85	29.511.000				100	34.361.000	100,00%	100,00%	100,00	34.361.000	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	76	Orang	50.000.000			76	49.955.000				76	49.955.000	100,00%	99,91%	76,00	49.955.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	30.808.300	15	3.320.000	35	10.655.300	21	7.809.000	29	8.858.000	100	30.642.300	100,00%	99,46%	100,00	30.642.300
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	272.832.860	20	32.917.000	30	54.769.880	10	62.686.400	40	117.843.570	100	268.216.850	100,00%	98,31%	100,00	268.216.850
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	2123	Orang	2.649.641.800	15	84.298.180	80	595.382.300	450	(19.588.000)	1.455	1.946.075.000	2.000	2.606.167.480	94,21%	98,36%	2000,00	2.606.167.480

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	35.817.500		15	14.600.000	10	4.150.000	25	13.850.000	50	32.600.000	100,00%	91,02%	50,00	32.600.000	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	139.289.000	10	21.450.000	10	31.642.000	5	6.930.000	25	78.710.000	50	138.732.000	100,00%	99,60%	50,00	138.732.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.932.982.000									1.836.886.900		95,03%		1.830.166.900	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				6.720.000							6.720.000		6.720.000		100,00%			
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Orang	6.720.000						5	6.720.000	5	6.720.000	100,00%	100,00%	5,00	6.720.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.926.262.000		40.550.000		168.743.600		174.350.000		95.700.000		1.830.166.900		95,01%		1.830.166.900
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	139.700	Orang	142.350.000	20.000	11.750.000	20.000	24.248.000	10.000	7.600.000	89.700	95.700.000	139.700	139.298.000	100,00%	97,86%	139700,00	139.298.000
Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota	3.876	Keluarga	1.783.912.000	25	28.800.000	25	144.495.600	51	166.750.000	3.744	1.350.823.300	3.845	1.690.868.900	99,20%	94,78%	3845,00	1.690.868.900
PROGRAM PENANGANAN BENCANA				238.280.000									236.647.478		99,31%		231.462.478	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				76.360.000				9.142.228		34.474.000		31.360.000		74.976.228		98,19%		69.791.228

Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	68.000.000		20,0	9.142.228	78	34.474.000	52	23.001.000	150	66.617.228	100,00%	97,97%	150,00	66.617.228	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	5.185.000						15	5.185.000	15	5.185.000	100,00%	100,00%	15,00	5.185.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	3.175.000						10	3.174.000	10	3.174.000	100,00%	99,97%	10,00	3.174.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				161.920.000			56.919.250		5.490.000		93.393.500		161.671.250		99,85%		161.671.250	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	46	Orang	161.920.000	8	5.868.500	8	56.919.250	4	5.490.000	26	93.393.500	46	161.671.250	100,00%	99,85%	46,00	161.671.250
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				17.458.900									15.410.600		88,27%		15.410.600	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				17.458.900			4.189.500		4.946.100		5.650.000		15.410.600		88,27%		15.410.600	

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55	Makam	17.458.900	5,00	625.000	15,00	4.189.500	11	4.946.100	24	5.650.000	55	15.410.600	100,00%	88,27%	55,00	15.410.600
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				93.568.000										92.944.034		99,33%		31.172.634
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				93.568.000		19.968.800		2.184.200		61.246.034		9.545.000		92.944.034		99,33%		31.172.634
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	36	Dokumen	31.721.000	6	16.188.800	6	84.200	19	10.809.634	5	4.090.000	36	31.172.634	100,00%	98,27%	36,00	31.172.634
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36	Dokumen	61.847.000	2	3.780.000	2	2.100.000	29	50.436.400	3	5.455.000	36	61.771.400	100,00%	99,88%	36,00	61.771.400
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.539.632.000										1.529.080.716		99,31%		1.041.895.287
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.539.632.000		97.602.000		154.371.600		326.182.330		710.443.362		1.529.080.716		99,31%		1.041.895.287

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36	Dokumen	1.050.277.000	6	57.160.000	5	59.242.000	1,50	215.049.925	23,50	710.443.362	36	1.041.895.287	100,00%	99,20%	36,00	1.041.895.287
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36	Lembaga	160.000.000	6	26.295.000	6	38.000.000	8	23.078.834	16	72.306.200	36	159.680.034	100,00%	99,80%	36,00	159.680.034
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	36	Laporan	129.355.000	6	7.647.000	6	49.613.700	9	16.704.634	15	55.206.917	36	129.172.251	100,00%	99,86%	36,00	129.172.251
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50	Keluarga	100.000.000	3,50	6.500.000	-		2,50	5.080.000	44	87.168.307	50	98.748.307	100,00%	98,75%	50,00	98.748.307
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	Keluarga	100.000.000			5,00	7.515.900	32	66.268.937	13	25.800.000	50	99.584.837	100,00%	99,58%	50,00	99.584.837
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														98,62%	98,02%			
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
				13.904.271.740	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								13.628.836.667	98,62%	98,02%			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan Penghargaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai
Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan	Juara 1	Provinsi	Gubernur Riau
2	Piagam Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan	Juara 3	Regional	Menteri Dalam Negeri
2	Piagam Penghargaan Lomba LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	Juara 2	Provinsi	Gubernur Riau
4	Sertifikat Penghargaan Karang Taruna Berprestasi	Juara 2	Provinsi	Kepala Dinas Sosial Prov. Riau

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat
Kota Dumai,

drg. HERMIYATI

Pembina Utama Muda
Nip. 19711229 200012 2 00

1. DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI TAHUN 2023

PENYALURAN BANSOS PANGAN STUNTING



PENYALURAN BANTUAN BERAS PEMKO



PENYALURAN BANTUAN LANSIA & DISABILITAS



PENYALURAN BANTUAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL



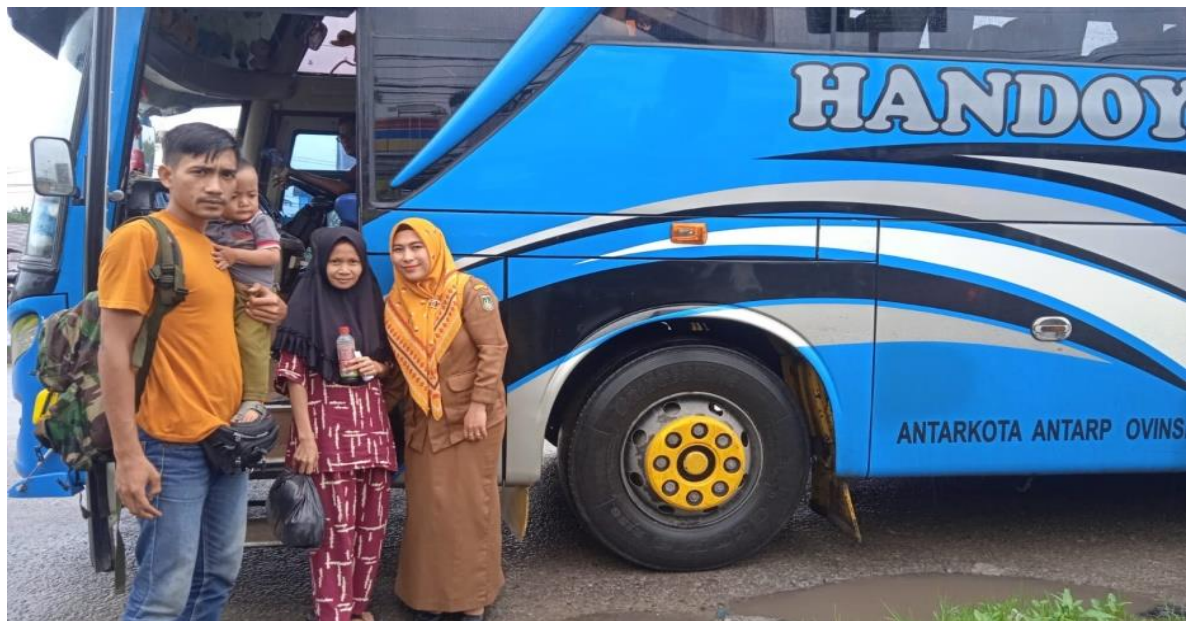
PENYALURAN BANTUAN ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS & LANSIA



RAZIA GEPENG



PENANGANAN ORANG TERLANTAR



KEGIATAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KEL (EPDESSEL)



LOMBA LKM KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG



2. DOKUMENTASI PRESTASI DAN PENGHARGAAN

PENGHARGAAN LOMBA DESA/KELURAHAN SE PROVINSI RIAU



PENGHARGAAN LOMBA DESA/KELURAHAN TINGKAT REGIONAL



PENGHARGAAN LOMBA LPM SE PROVINSI RIAU



PENGHARGAAN KARANG TARUNA BERPRESTASI DARI PROV RIAU

